



**POKOK-POKOK PIKIRAN
KETERAMPILAN MENJELANG 2020
DAN PERKEMBANGAN**

Hasil kajian terhadap Laporan Satgas
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
di Indonesia
Depdikbud - Oktober 1997

Direktorat
Pendidikan Menengah

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
Proyek Pengembangan Sistem dan Standard Pengelolaan SMK

Jakarta, Oktober 2001

393.24
DIR
P

**POKOK-POKOK PIKIRAN
KETERAMPILAN MENJELANG 2020
DAN PERKEMBANGANNYA**

Hasil kajian terhadap Laporan Satgas
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
di Indonesia
Depdikbud – Oktober 1997

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
Proyek Pengembangan Sistem dan Standard Pengelolaan SMK
Jakarta, Oktober 2001

KATA PENGANTAR

Laporan Satuan Tugas (Satgas) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia tahun 1997 tentang "Keterampilan Menjelang 2020", memuat sejumlah gagasan tentang penataan dan pengembangan sistem pendidikan kejuruan. Gagasan tersebut sangat penting untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka penataan ulang sistem, perencanaan dan implementasi Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan telah mengeluarkan kebijakan Reposisi Pendidikan Menengah Kejuruan menjelang 2020 dan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pendidikan Menengah Kejuruan 2001-2005.

Naskah Pokok-pokok pikiran ini merupakan rangkuman dari gagasan pokok yang tertuang dalam Buku Keterampilan Menjelang 2020, agar dapat menjadi acuan dalam perumusan program dan kebijakan yang lebih operasional dalam penataan dan pengembangan Sistem Pendidikan Kejuruan di Indonesia, sesuai dengan arah kebijakan Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020.

Jakarta, Oktober 2001

Direktur Dikmenjur



 Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto
NIP 130675814

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bagian Pertama: Tuntutan Ekonomi	1
Bagian Kedua: Pendidikan Kejuruan Untuk Masa Depan Indonesia	3
Bagian Ketiga: Sistem Diklat Yang Dipacu Oleh Dunia Usaha/Industri	6
Bagian Keempat: Peserta Didik dan Program Diklat	8
Bagian Kelima: Jalur Yang Fleksibel dan Permeabel	13
Bagian Keenam: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	16
Bagian Ketujuh: Pengelolaan Sistem	28

Bagian Pertama: Tuntutan Ekonomi

1. Memasuki era perdagangan bebas APEC tahun 2020, Indonesia memiliki posisi demografi yang strategis dan menguntungkan untuk dapat memanfaatkan teknologi baru dan untuk memasarkan barang-barang hasil teknologi tinggi. Sementara s.d. tahun 2000 struktur angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tidak lebih dari SD 6 tahun.
2. Dunia usaha/industri sebagai pemakai tenaga kerja harus melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerjanya, agar dapat meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk yang dapat bersaing di pasar bebas.
3. Sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) kejuruan tidak dapat terlepas dari pengaruh tuntutan ekonomi, karena tujuan utamanya adalah memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan agar tamatannya menjadi tenaga kerja produktif, mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta dapat mengembangkan dirinya guna menghadapi perubahan yang kian cepat.
4. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan lembaga diklat kejuruan yang handal dan mampu menerapkan prinsip *Total Quality Management* (TQM), agar dapat menjawab tantangan permasalahan dunia kerja.

5. Selain itu jiwa dan kemampuan kewirausahaan perlu dikembangkan sebagai bagian dari diklat kejuruan, yang mempersiapkan peserta didik menguasai keterampilan hidup dan lebih berdaya saing, sehingga mampu membuka peluang penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua: Pendidikan Kejuruan Untuk Masa Depan Indonesia

1. Potensi yang sangat besar dimiliki bangsa Indonesia, di samping sumber daya lainnya, adalah kuantitas tenaga kerja yang berlimpah. Agar potensi tersebut dapat berubah menjadi sumber daya pembangunan, diperlukan sistem diklat kejuruan yang mampu meningkatkan kompetensi generasi muda Indonesia yang akan memasuki dunia kerja, melatih ulang serta meningkatkan kompetensi mereka yang sudah bekerja, selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja.
2. Keterlibatan dunia kerja, khususnya dunia usaha/industri harus terus dikembangkan dalam menerapkan kebijaksanaan pengelolaan sistem Diklat. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai implementasi dari kebijakan *Link & Match* merupakan bukti adanya keterlibatan aktif pihak dunia usaha/industri dalam pengelolaan Diklat kejuruan.
3. Peningkatan jenjang pendidikan akan meningkatkan status, tetapi belum tentu meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja. Karena itu perlu dikembangkan suatu sistem Diklat kejuruan yang dapat meningkatkan status sekaligus meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Sistem Diklat dimaksud adalah sistem Diklat berbasis kompetensi atau *competency based training (CBT)*.

4. Paradigma program Diklat kejuruan menjelang 2020 menekankan pada perubahan-perubahan mendasar, antara lain sebagai berikut:
 - a. orientasi Diklat kejuruan dikembangkan dari *supply driven* ke *demand driven*;
 - b. sistem pengelolaan Diklat kejuruan dari terpusat menjadi terdesentralisasi;
 - c. pendekatan pembelajaran Diklat kejuruan bergeser dari pendekatan mata pelajaran menjadi pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (CBT);
 - d. pola penyelenggaraan yang sangat terstruktur menjadi lebih fleksibel dan permeabel.

5. Untuk mengimplementasikan perubahan paradigma pendidikan tersebut, Direktorat Dikmenjur telah mencanangkan program '*Re-engineering*', yang terangkum dalam kebijakan 'Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020' dan bertujuan antara lain untuk melakukan:
 - a. penataan bidang/program keahlian SMK;
 - b. penataan sistem penyelenggaraan diklat, dan
 - c. peningkatan peran SMK sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT).

6. Dalam konteks ini SMK masa depan Indonesia adalah SMK sebagai PPKT, yang selain menyelenggarakan program diklat reguler, juga menjadi tempat penyelenggaraan:

- a. Diklat kompetensi kejuruan yang fleksibel jangka pendek, dengan sistem *multy entry - multy exit*,
- b. pelayanan jasa dan produksi, dan
- c. Diklat lanjutan setara program Diploma.

Penyelenggaraan program diklat tersebut di atas menggunakan pola CBT, yang mengacu pada standar kompetensi yang telah mendapat pengakuan, baik secara nasional maupun internasional.

7. Peserta didik pada SMK PPKT adalah semua anggota masyarakat yang berminat baik para pencari kerja seperti siswa dan tamatan SMU, SLTP atau SD, maupun para pekerja di dunia usaha/industri.

Dalam pokok-pokok pikiran ini, istilah SMK digunakan dalam arti yang luas. Termasuk di dalamnya adalah SMK Negeri dan Swasta yang berada di bawah pembinaan Depdiknas dan berbagai sekolah khusus serta sekolah-sekolah lain yang berada di bawah pembinaan departemen/lembaga/instansi lain.

Bagian Ketiga : Sistem Diklat Yang Dipacu Oleh Dunia Usaha/Industri

1. Sistem Diklat berbasis kompetensi akan banyak manfaatnya bagi Industri karena standar kompetensi dan standar program Diklatnya dibuat atas dasar kebutuhan industri/pasar kerja.
2. Standar kompetensi menjadi acuan luaran (*outcome*) yang pencapaiannya dibuktikan melalui uji dan sertifikasi kompetensi. Dengan demikian standar kompetensi akan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum/program Diklat, bahan pembelajaran, uji kompetensi dan sertifikasi, kompetensi guru dan manajemen Diklat.
3. Sambil menunggu ketetapan dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar kompetensi yang akan dijadikan acuan terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Internasional, yang berlaku dan menjadi acuan semua dunia usaha/industri di seluruh dunia, dan
 - b. Standar Kompetensi Nasional, yang mengacu pada standar internasional, meskipun tetap disesuaikan dengan kebutuhan nasional.
4. Untuk menjamin ketercapaian kompetensi sesuai standar kompetensi tersebut di atas, maka sistem Diklat harus dikembangkan secara realistis dan spesifik pada penguasaan kompetensi.

5. Upaya peningkatan kompetensi SDM akan berhasil optimal jika dunia usaha/ industri berperan serta secara aktif dalam proses pembinaan dan pengembangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tak kalah pentingnya adalah pengakuan terhadap kualitas produk diklat kejuruan. Sebagai contoh, dunia usaha/industri memberikan fasilitas praktik kepada peserta Diklat kejuruan, menyediakan tempat magang bagi para guru kejuruan, penugasan staf untuk mengajar atau menjadi pembicara tamu.

Bagian Keempat: Peserta Didik dan Program Diklat

1. Sasaran peserta didik SMK harus melihat pada kerangka kebutuhan nasional yang lebih luas. Hal ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan seseorang yang sudah berada di dunia kerja.

Karena itu, sistem pengelolaan diklat kejuruan seharusnya mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti program reguler dan program diklat jangka pendek bagi para pencari kerja, serta program-program khusus bagi para pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi maupun statusnya.

2. Program diklat diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian atau relevansi antara program diklat yang dilaksanakan di dunia pendidikan dan tuntutan keahlian yang diperlukan di dunia kerja.

Prioritas pembaruan program diklat kejuruan untuk meningkatkan relevansi tersebut dilakukan melalui Pendidikan Sistem Ganda.

3. Makna utama dari Pendidikan Sistem Ganda ialah sistem penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan tidak hanya pada lembaga diklat saja, tetapi juga pada institusi pasangan di dunia usaha/industri, serta lembaga-lembaga lain yang mampu memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapainya. Melalui sistem penyelenggaraan diklat ini, diharapkan kemitraan antara SMK dengan dunia usaha/industri pada berbagai tingkatan, dari yang

berskala internasional, regional, nasional maupun lokal dapat terealisasi, sehingga kebutuhan biaya pengelolaan diklat yang cukup besar dapat ditanggulangi bersama.

4. Pemagangan akan memiliki peran penting dalam melatih tenaga kerja baru.

Kelompok peserta didik lain yang perlu mendapat perhatian dalam sistem diklat kejuruan adalah kelompok generasi muda yang sudah lepas dari pendidikan formal memasuki lapangan kerja melalui program pemagangan (*apprenticeship*). Kegiatan diklat yang dilakukan di luar lingkungan dan jam kerja (*off-the-job training*) dalam program ini hingga kini diselenggarakan baik di pusat-pusat pelatihan yang dikelola oleh departemen-departemen lain di luar Depdiknas maupun oleh lembaga-lembaga diklat yang berada di bawah Depdiknas. Beberapa SMK binaan Depdiknas saat ini telah melayani kegiatan *off-the-job training* bagi pemegang industri dengan mengenakan biaya pelatihan tertentu.

5. SMK perlu mengubah perannya secara bertahap sehingga dapat memenuhi misi diklat kejuruan yang lebih luas.

Tanpa mengurangi tanggung jawab departemen-departemen lain, sistem SMK harus mampu melayani kepentingan ketiga jenis peserta didik, yaitu siswa reguler, pencari kerja dan pekerja. Hal ini akan memerlukan waktu agar dapat berproses secara bertahap.

6. Meningkatkan pemanfaatan SMK yang sudah ada (*existing*) jauh lebih penting dari pada menambah jumlah SMK, walaupun kebutuhan setempat akan sekolah baru tetap perlu dipertimbangkan.

Prioritas pengembangan sistem SMK untuk perluasan jumlah sekolah bukanlah hal yang utama, walaupun penambahan jumlah tersebut masih diperlukan sesuai dengan kebutuhan setempat. Prioritas pengembangan di sini lebih ditekankan pada peningkatan efisiensi internal (*internal efficiency*) SMK, berkaitan dengan peran yang harus dijalankannya pada masa yang akan datang. Aspek efisiensi internal SMK yang perlu segera dibenahi adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas SMK untuk melayani berbagai jenis peserta didik dalam cakupan yang lebih luas;
 - b. Memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan kejuruan sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia usaha/industri.
7. Untuk mampu bersaing di pasar kerja, peserta didik SMK harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang luwes, yang mencakup kompetensi kunci dan kompetensi pada bidang keahlian tertentu.

Pemikiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa dunia usaha/industri lebih mengutamakan karyawan yang memiliki kemampuan yang fleksibel, mandiri, mampu bekerja dalam kelompok dan sebagai warganegara yang bertanggung-jawab. Karena itu, pengembangan standar

kompetensi harus mawadahi kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas.

8. Perbedaan jangka waktu praktik kerja akan menghasilkan tingkat kompetensi yang berbeda, sehingga pengoptimasian program praktik kerja perlu dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada peserta didik.

Perbedaan kemampuan belajar dan kesempatan melakukan praktik kerja akan menghasilkan tingkat kompetensi yang berbeda pula, sehingga diperlukan pengoptimasian program praktik kerja agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada peserta didik.

Semua program diklat pada awalnya dimulai dengan proses mempelajari dasar-dasar kejuruan. Selanjutnya peserta didik akan menempuh program gabungan antara *'work based learning'* dan *'school based learning'*. Program-program diklat yang mengandung proporsi kerja industri yang lebih besar akan memberikan pengalaman kerja yang lebih intensif dan memberikan nilai tambah terhadap penguasaan tingkat kompetensi kepada peserta didik.

9. Para pekerja akan mendapatkan manfaat dari pelatihan jangka pendek yang menggunakan sistem modul, karena selain modul-modul tersebut dirancang untuk suatu program yang mengarah pada penguasaan kompetensi yang lebih luas, mereka dapat mengikuti program pelatihan tersebut sesuai dengan peluang yang dimilikinya.

10. Untuk memberikan motivasi, perkembangan dan kemajuan berbagai kompetensi yang telah dikuasai para peserta didik perlu diberi pengakuan secara formal melalui sistem pengujian dan perolehan sertifikat kompetensi. Pada gilirannya sertifikat kompetensi tersebut akan dapat mereka gunakan sebagai senjata bagi perolehan promosi di tempat kerja.

Perkembangan dan kemajuan tersebut direkam dalam Paspor Keterampilan, yang dirancang untuk memberikan pernyataan yang jelas tentang kompetensi yang telah dikuasai pemegangnya, sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh dunia usaha/industri pada saat pemegang paspor tersebut melamar pekerjaan.

Bagian Kelima: Jalur Yang Fleksibel dan Permeabel

1. Hal yang harus dihindari pada sistem diklat adalah hilangnya kesempatan peserta didik untuk dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan lain/lanjutan karena jalur pendidikan yang berbeda.

Dalam setiap sistem diklat, khususnya diklat kejuruan, perlu diberikan beberapa keluwesan sehingga seseorang yang telah memilih suatu jalur pendidikan tidak tertutup kemungkinan untuk pindah ke jalur yang lain. Contoh yang sampai saat ini sedang terjadi di Indonesia ialah sulitnya tamatan dari sistem SMK untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu, para orang tua cenderung menyekolahkan anaknya ke jalur SMU dari pada SMK hanya karena jalur SMU lebih banyak memberikan pilihan pendidikan lanjutan kepada anak mereka di kemudian hari.

2. Dibutuhkan jalur pendidikan yang fleksibel dan permeabel.

Pada tingkat pasca sekolah, juga dipandang perlu memberikan keluwesan sistem sehingga peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan singkat. Dengan cara yang sama peserta didik dapat pindah dari jalur akademik ke jalur profesional dan atau sebaliknya. Untuk maksud ini diperlukan program diklat yang dapat menjembatani perpindahan kedua program tersebut.

Dengan demikian, peserta didik tidak perlu mengulang segala sesuatu dari awal lagi, jika mereka ingin melanjutkan pendidikan atau pindah jalur.

3. Konsep artikulasi, transfer kredit, dan Pengakuan Hasil Belajar Awal (PHBA) atau *Recognition of Prior Learning* (RPL), merupakan bagian integral dari seluruh program diklat. Sistem diklat yang fleksibel dan permeabel harus dirancang atas dasar tiga konsep:
 - a. artikulasi antar program;
 - b. transfer kredit dari satu program ke program yang lain;
 - c. pengakuan hasil belajar awal melalui penilaian, tanpa mempedulikan bagaimana dan di mana keterampilan dan pengetahuan tersebut diperoleh.

Dengan konsep di atas, peserta didik dari jalur diklat yang berbeda, hanya akan memenuhi kekurangan dari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengikuti program diklat yang akan diikutinya. Pada saat pemenuhan kekurangan-kekurangan ini, hakikat program matrikulasi yang menjembatani (*bridging program*) menjadi sangat penting.

Pengembangan sistem diklat berdasarkan kompetensi akan mempermudah lembaga diklat dalam penerapan ketiga konsep di atas. Namun demikian, lembaga diklat perlu melakukan langkah-langkah khusus untuk membantu calon peserta didik agar dapat mengikuti program-programnya. Sebagai contoh, beberapa perguruan tinggi di Indonesia menerapkan program matrikulasi terhadap tamatan SMK untuk membantu mereka mengikuti program-program diploma yang

diselenggarakan secara reguler oleh perguruan tinggi tersebut.

4. Program diklat yang fleksibel lebih memungkinkan terselenggaranya pembelajaran kontekstual.

Istilah pembelajaran kontekstual digunakan untuk menjelaskan pengintegrasian antara teori dan praktik. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan pembelajaran yang paling baik adalah proses pembelajaran yang tidak memisahkan antara teori dan praktik, tetapi mengintegrasikan kegiatan praktik untuk keterampilan yang sedang dipelajari dengan pengetahuan fisika, kimia, matematika, dan lain-lain yang merupakan dasar pengetahuan bagi keterampilan tersebut. Karena itu, pengembangan program diklat kejuruan sebaiknya didasarkan pada pendekatan pembelajaran kontekstual.

Bagian Keenam: Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

1. SMK merupakan salah satu lembaga penyelenggara diklat kejuruan yang harus dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didiknya walaupun kondisi fasilitasnya sangat beragam.

Sebagaimana telah diungkapkan, investasi dan pembiayaan operasional terbesar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pendidikan kejuruan adalah pada sistem SMK. Diperkirakan jumlah peserta didik lembaga diklat kejuruan (SMK) yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas, sudah mencapai lebih dari 1.800.000 orang. Kondisi fasilitas lembaga-lembaga diklat tersebut sangat bervariasi, dari yang telah memiliki cukup peralatan sampai yang menggunakan peralatan pinjaman atau yang tidak memiliki peralatan praktik. Karena itu tidak realistis jika dikatakan bahwa secara umum lembaga-lembaga diklat tersebut (SMK) dapat atau tidak dapat melaksanakan fungsinya, yaitu membekali keterampilan kepada masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa ada yang memang dapat melaksanakan fungsinya tersebut dengan baik dan ada juga yang tidak dapat.

Satu-satunya yang konstan dalam sistem SMK adalah kebutuhan para peserta didiknya. Setiap peserta didik akan mencari program yang dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, pengalaman, wawasan dan hubungan untuk membantu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Tidak hanya

sekedar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang memiliki prospek karir yang baik. Tidak semua orang dapat memperoleh apa yang mereka inginkan dalam karir, karena sebagian harus puas dengan pilihan kedua bahkan pilihan terakhir, sehingga masing-masing mereka berusaha memperbesar prospek bagi dirinya terlebih dahulu. Inilah tugas SMK untuk berbuat yang terbaik bagi peserta didiknya dengan memanfaatkan segenap sumberdaya internal maupun eksternal yang tersedia. Penerapan pola pembelajaran diklat berdasarkan kompetensi (*Competency Based Training*) diharapkan akan membantu SMK untuk secara bertahap meningkatkan mutu dan relevansi program-programnya.

Dengan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didiknya, SMK juga telah berbuat yang terbaik bagi dunia usaha/industri serta masyarakat sekitarnya. Tidak dipungkiri bahwa ada SMK yang tidak mampu membekali keterampilan yang sesuai dengan standar kompetensi minimal yang dituntut dunia usaha/industri, baik melalui pendidikan dan pelatihan di lembaga diklatnya maupun melalui kerja praktik industri. Lembaga diklat seperti itu sebaiknya didorong untuk bermitra dengan lembaga diklat kejuruan lain dan/atau industri sekitar, sehingga mutu pengelolaan, fasilitas dan tenaga pengajar/instruktornya akan memenuhi standar diklat yang dipersyaratkan.

2. SMK perlu didorong untuk menyelenggarakan pelatihan bagi perusahaan dan masyarakat secara komersial sebagai bagian dari kegiatan unit produksinya, dan SMK perlu memberikan ide-ide baiknya untuk praktik-praktik komersial.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar SMK bersemangat untuk berwirausaha dalam melaksanakan diklatnya dan mampu memasuki tahap kemandirian melalui kegiatan komersial. Tampaknya tidak ada peraturan yang bertentangan dengan pendekatan ini, bahkan ada beberapa contoh atas inisiatif individu yang sudah berjalan dengan baik. Memang dibutuhkan suatu perangkat wirausaha di dalam sistem manajemen SMK serta pengembangan pemikiran-pemikiran staf seniornya dalam praktik-praktik komersial, agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. PPPG-PPPG memegang peran penting dalam penyelenggaraan diklat tersebut dan menyediakan model-model serta bahan-bahan ajarnya.

3. Kesepakatan Kinerja harus dilembagakan untuk pemberdayaan SMK, dan peningkatan mutu melalui 'best practice' atau TPM harus dijadikan sebagai program perencanaan SMK.

Agar dapat melaksanakan kebijakan pemberdayaan pada tingkat SMK, perlu dilaksanakan dua strategi berikut.

Pertama, ialah pengembangan Kesepakatan Kinerja SMK. Kesepakatan Kinerja disusun oleh SMK, sebagai dasar untuk menetapkan sasaran program tahun berikutnya. Kesepakatan tersebut harus dimusyawarahkan dengan Majelis Sekolah dan pihak yang berwenang di daerah dan hasilnya ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut. Pada kesempatan ini Dalam Kesepakatan Kinerja tersebut SMK harus telah menetapkan sasaran-sasaran untuk praktik kerja industri peserta didiknya, program pelatihan yang akan

dilaksanakan, peningkatan kualitas yang akan dicapai, hubungan/kerja sama industri yang akan dikerjakan, dan hal-hal lain yang relevan. Pada awalnya PPPG diharapkan dapat mengembangkan dan memasyarakatkan program ini dengan maksud agar selanjutnya SMK, masyarakat yang terkait dan pihak yang berwenang di wilayah mampu mensinergikan rencana program mereka ke arah pemberdayaan SMK.

Kedua, dengan bantuan PPPG, SMK menyusun rencana peningkatan dan pengendalian mutu. Secara terstruktur proses ini dapat menggunakan '*Total Performance Management*' (TPM), atau penyusunan rencana berdasarkan konsep-konsep perencanaan sejenis terdahulu, baik yang dibuat dari dalam ataupun dari luar SMK, dan telah memperlihatkan keberhasilannya dengan sangat baik (*benchmarking* atau *best practices*). Pilihan perangkat yang tepat untuk peningkatan dan pengendalian mutu tersebut perlu mendapat kesepakatan bersama antara SMK dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan SMK. Pendekatan secara umum ini membawa beberapa keuntungan. Pertama, memberikan tanggung jawab peningkatan mutu langsung kepada setiap SMK dan stafnya, sehingga terjadi pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) dalam merancang mutu yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua, SMK akan mulai menggunakan cara-cara yang diterapkan oleh industri mitranya, sehingga SMK akan menggunakan bahasa dan pendekatan yang sama dengan dunia usaha/industri yang menjadi mitranya tersebut. Ini adalah hal yang baik bagi peningkatan mutu dan relevansi program diklat SMK.

4. Peningkatan peran PPPG dalam peningkatan dan perbaikan mutu SMK merupakan hal yang penting.

Dalam pemberdayaan SMK di atas, PPPG mempunyai peran yang sangat penting. PPPG seharusnya tidak hanya sekedar melaksanakan program pelatihan bagi guru, tetapi karena memiliki pengalaman dan keahlian dalam pengembangan bahan ajar, PPPG juga dapat membantu SMK dalam pelatihan manajemen dan menjadi penggerak dalam perbaikan mutu SMK. PPPG harus terus mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam pengembangan manajemen, kepemimpinan, bahan ajar, dan kurikulum. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup tugas yang luas tersebut PPPG seyogyanya diubah namanya untuk memperluas dari hanya sekedar pusat penataran guru saja.

5. SMK harus mencari jalan sehingga kesejahteraan guru meningkat dan memberikan kesejahteraan bagi mereka untuk melaksanakan praktik kerja di dunia usaha/industri di mana para peserta didiknya melakukan praktik kerja.

Membicarakan SMK tanpa menyinggung masalah guru tentunya tidak akan lengkap. Beberapa kali dalam membicarakan masalah guru selalu terungkap tentang kesulitan mendapatkan guru yang baik. Rata-rata mereka tidak memiliki pengalaman industri yang cukup, padahal diperlukan untuk menaikkan kredibilitas program diklat kejuruan. Gaji dan kesejahteraan guru disebutkan sebagai kendala utama. Meskipun demikian, ada beberapa SMK yang telah dapat memberikan

'tambahan' penghasilan gurunya melalui kegiatan produksi.

Jika beberapa SMK mampu mengembangkan kegiatan produksi dan juga menjual pelatihan jangka pendek ke dunia usaha/industri, keuntungan yang diperoleh SMK tersebut akan dapat dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan guru. SMK harus mampu membuat program dengan dunia usaha/industri sehingga mereka mau memperbantukan tenaga ahlinya untuk pengajaran praktik di SMK tersebut. Melalui kerjasama ini dunia usaha/industri diharapkan dapat menyediakan tempat praktik kerja industri bagi guru maupun peserta didik sebagai bagian dari perannya dalam peningkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Khususnya dalam hal unit produksi, sebaiknya dalam praktiknya SMK berhati-hati guna menghindari memberikan harapan yang berlebihan kepada pelanggan. Akan menjadi kontra produktif jika SMK menawarkan sesuatu yang tidak dapat direalisasikan, kualitas yang ditawarkan rendah atau penyerahan barang tidak tepat waktu. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam melakukan kerja sama dengan dunia usaha/industri. Karena itu, sebagai bagian dari pengembangan staf senior SMK yang akan mengelola unit produksi, pelatihan 'perencanaan usaha' dan 'keterampilan manajemen' merupakan materi pelatihan yang dipandang paling efektif.

6. Pemerintah dapat menggunakan berbagai cara untuk mendorong dunia usaha/ industri berpartisipasi dalam pelatihan, misalnya melalui pendekatan "wortel & tongkat" (*carrot & stick*). Namun demikian, kesepakatan cara terbaik tergantung pembicaraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri.

Hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru dan pemberian kesempatan praktik kerja industri kepada mereka sehubungan dengan peningkatan pengetahuan dan wawasannya sebenarnya berkaitan dengan masalah yang lebih luas, yaitu tentang alternatif sumber pembiayaan diklat kejuruan. Pada dasarnya, baik ditingkat nasional maupun wilayah, ada berbagai cara untuk membiayai diklat kejuruan. Salah satunya melalui iuran (*levy*) bagi perusahaan yang mempekerjakan orang asing. Perusahaan ini dikenakan kewajiban untuk menyumbangkan sejumlah dana setiap bulan bagi setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya untuk keperluan diklat kejuruan. Contoh lain adalah sistem '*levy and grant*' yang dilaksanakan di Jawa Timur. Ada perbedaan pendapat tentang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana yang terkumpul dari dua cara di atas jika dilihat dari hasil keluarannya.

Masalah sumber pembiayaan diklat kejuruan pada dasarnya tidak hanya dirasakan pada tingkat SMK. Hal yang sama juga dirasakan oleh lembaga diklat kejuruan lain dan bahkan Politeknik. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai cara-cara pembiayaan diklat kejuruan akan mempunyai implikasi terhadap seluruh lembaga diklat kejuruan yang ada. Meskipun demikian, tanpa harus menunggu kebijakan mengenai hal itu, aparat pemerintah pada tingkat pusat dan daerah harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong dunia usaha/industri agar bersedia menyediakan stafnya yang berpengalaman untuk membimbing peserta didik yang sedang melaksanakan praktik kerja industri di institusi mereka. Salah satu

cara pemberian insentif/penghargaan kepada dunia usaha/ industri yang mungkin dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong kesediaan mereka berpartisipasi adalah pemberian kontrak proyek-proyek pemerintah kepada dunia usaha/industri yang telah membantu program SMK. Cara lain adalah pemberian penghargaan kepada dunia usaha/industri yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda. Tentu ada cara yang lebih sulit, misalnya; perusahaan internasional (investor asing) dapat diminta mengajukan perencanaan pelatihan sebagai bagian dari persetujuan investasinya, di mana dalam perencanaan pelatihan tersebut diuraikan bagaimana rencana pelatihan untuk karyawannya sendiri dan bagaimana rencana membantu SMK setempat dalam melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda. Untuk perusahaan nasional, dapat pula perusahaan tersebut dipersyaratkan menyusun rencana pelatihan yang dapat dikaitkan dengan perpajakan dan diberlakukan berbagai sanksi bila tidak melaksanakannya.

Ternyata penggunaan cara pengaturan pajak untuk membiayai diklat kejuruan merupakan hal yang kompleks. Hal ini telah dicoba di beberapa negara berkembang dengan berbagai ragam keberhasilan. Cara-cara seperti ini biasanya menimbulkan kontroversi, khususnya pada masa-masa awalnya. Berbagai contoh mengenai cara pendanaan diklat kejuruan telah diuraikan dan pilihan cara apapun hendaknya diputuskan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Karena itu, keputusan ini tidak dapat hanya ditentukan oleh satu departemen saja, misalnya Depdiknas, karena menyangkut berbagai

prioritas lain di masing-masing departemen. Terlebih lagi tentang kebijakan perpajakan, pemerintah harus mempertimbangkan posisi komparatif perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia serta mempertimbangkan segi positif dan negatifnya dari perspektif internasional. Untuk hal ini tentunya pemerintah akan mempertimbangkan pendapat dan saran dari para usahawan dalam memutuskan alternatif pendanaan diklat kejuruan di Indonesia.

7. Lembaga diklat lain termasuk lembaga diklat non-formal, departemen lain, dan industri/perusahaan juga mempunyai akses ke dalam standar dan sertifikasi kompetensi.

Seluruh lembaga diklat kejuruan hendaknya dapat memetik manfaat dari dikembangkannya standar dan sertifikasi kompetensi, karena digunakannya standar tersebut merupakan acuan bersama dalam mengukur keberhasilan pencapaian kompetensi pada semua program diklat kejuruan. Lembaga ini termasuk lembaga-lembaga diklat kejuruan non-formal yang menyelenggarakan diklat jangka pendek, pusat-pusat pelatihan maupun berbagai lembaga diklat yang berada di bawah pembinaan departemen lain di luar Depdiknas. Diklat keterampilan Departemen Hankam pun dapat menarik manfaat dari pengembangan standar dan sertifikasi kompetensi itu. Jika anggota TNI telah pensiun dan memiliki Paspor Keterampilan, maka pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam Paspor Keterampilan dapat membantunya memperoleh pekerjaan. Demikian juga dengan pusat-pusat pelatihan yang didirikan oleh

perusahaan, lembaga-lembaga diklat tersebut dapat pula menarik manfaat atas pengembangan standar dan sertifikasi kompetensi. Gambar 5.1 menunjukkan jalur dan interaksi antara jalur diklat formal dan jalur diklat lainnya serta bagaimana kesemuanya dapat mempunyai akses pada sertifikasi kompetensi.

8. Departemen-departemen selain Depdiknas dapat tetap mengembangkan dan mengkoordinasikan pusat-pusat pelatihan yang bersifat khusus maupun sekolah-sekolah yang di bawah naungannya.

Tidak ada suatu keharusan pelimpahan lembaga-lembaga diklat kejuruan yang berada di bawah pembinaan departemen-departemen lain ke Depdiknas. Jika departemen lain memandang penting untuk mengalokasikan anggaran diklatnya ke Depdiknas, penerapan standar dan sertifikasi kompetensi ini tidak menghalanginya. Selanjutnya, peran Departemen Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan diklat tenaga kerja adalah bagian yang penting dalam mengupayakan pelatihan di Indonesia. Karena itu, pengembangan BLK juga merupakan hal yang sangat penting. Koordinasi dalam diklat kejuruan melalui 'Kerangka Standar Nasional' merupakan cara yang terbaik dengan masukan nyata dari dunia usaha/industri.

9. Sistem diklat kejuruan yang menerapkan standar dan sertifikasi kompetensi akan dapat diakses oleh seluruh lembaga diklat yang bermutu dan merupakan wahana terbaik untuk promosi pasar diklat kejuruan.

Jalan terbaik untuk menumbuhkan pasar diklat sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah dengan menetapkan standar kompetensi sebagai basis untuk merancang kurikulum dan pengujian, sehingga peserta didik dari berbagai jalur diklat kejuruan akan mempunyai akses untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dari sistem yang diterapkan.

10. Pusat diklat keterampilan khusus dalam teknologi tinggi juga perlu dikembangkan, karena akan menaikkan status diklat.

Terdapat aspek lain dari diklat keterampilan yang tidak berkaitan dengan SMK tetapi harus mendapatkan prioritas, yaitu perlunya dikembangkan pusat-pusat diklat keterampilan tingkat tinggi yang khusus dirancang untuk mengisi kekurangan keterampilan-keterampilan spesifik, yang jika tidak ditangani secara serius akan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa hal, pusat diklat keterampilan khusus dapat dibiayai oleh industri, tetapi tergantung urgensinya, dapat juga dibiayai oleh pemerintah atau donor-donor lain. Pusat-pusat tadi tidak hanya sekedar memberikan diklat keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri tertentu, akan tetapi juga akan menaikkan martabat diklat di Indonesia terhadap dunia internasional, karena Indonesia telah menunjukkan tekadnya dalam mengembangkan keterampilan tingkat tinggi. Salah satu contoh yang menguntungkan posisi Indonesia adalah diklat teknologi tingkat tinggi dalam sektor telekomunikasi.

Dengan cara yang sama, penyelenggaraan Lomba Keterampilan tingkat nasional amat penting dalam meningkatkan martabat diklat kejuruan dan sekaligus mendorong generasi muda untuk selalu berorientasi pada wawasan mutu. Keikutsertaan Indonesia dalam lomba keterampilan internasional, selain akan menaikkan pamor diklat kejuruan di Indonesia, juga akan meningkatkan wawasan generasi muda terhadap pentingnya mutu.

Bagian Ketujuh: Pengelolaan Sistem

1. Diusulkan dibentuknya struktur nasional, agar standar kompetensi menjadi acuan dari sistem Diklat Kejuruan. Struktur nasional dimaksud adalah lembaga independen yang berperan dalam mengembangkan dan menetapkan kebijakan standarisasi, pengujian serta sertifikasi kompetensi. Lembaga tersebut menjadi organisasi pendukung penyelenggaraan Diklat kejuruan.
2. Sampai dengan tahun 2001 upaya pengembangan lembaga independen tersebut telah dilakukan, dan sedang diproses KEPRES tentang Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).
3. BNSP adalah lembaga semi pemerintah yang bersifat independent, bertugas menetapkan kebijakan standarisasi dan sertifikasi profesi serta melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Fungsi BNSP meliputi:
 - a. penetapan kebijakan standarisasi dan sertifikasi profesi;
 - b. penetapan standar kompetensi;
 - c. pelaksanaan akreditasi LSP;
 - d. pengembangan Sistem Informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
 - e. pelaksanaan kerjasama standarisasi dan sertifikasi, dan
 - f. pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi.

4. Lembaga pendukung BNSP terdiri atas:
 - a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 - b. Lembaga Diklat Profesi
 - c. Lembaga perwakilan BNSP di daerah
 - d. Pemerintah (instansi pembina fungsional).

5. Lembaga Standarisasi Profesi (LSP) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan pihak industri, mempunyai tugas untuk membantu BNSP dalam mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan pengujian kompetensi, sertifikasi kompetensi serta melakukan akreditasi terhadap lembaga Diklat profesi. LSP diakreditasi oleh BNSP.

6. BNSP bersama PEMDA dapat membentuk perwakilan BNSP di daerah. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah.

7. Struktur, mekanisme kerja dan keterkaitan antar lembaga dalam BNSP disarankan seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.

8. Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) yang telah ada tetap dapat berperan sebagai wadah kerja sama antara lembaga Diklat kejuruan (SMK) dengan dunia usaha/industri dalam pelaksanaan program Diklat kejuruan di SMK.

9. MPKN melalui kelompok-kelompok bidang keahlian (KBK) membantu lembaga Diklat untuk mengembangkan standar Diklat dan bahan ajar.

10. Uji kompetensi merupakan kunci dari sistem Diklat dengan Pola CBT. Proses uji kompetensi akan ditetapkan oleh BNSP dan dilaksanakan oleh LSP. Dengan demikian lembaga yang ingin menjadi LSP harus diakreditasi oleh BNSP.
11. Uji kompetensi dimaksudkan untuk membantu dunia usaha/industri dalam merekrut dan mempromosikan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan memacu peningkatan kompetensi yang bersangkutan.
12. Paspor keterampilan dapat digunakan sebagai alat bukti tentang kompetensi seseorang yang telah diuji secara formal. Paspor keterampilan memuat daftar kompetensi yang dimiliki oleh pemegang-nya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak dunia usaha/industri yang akan menerimanya.

Bagian Kedelapan : *Garis Besar Program Pembaruan*

1. Salah satu hal penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keterampilan menjelang 2020 ini adalah kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi pendanaan yang diperlukan.
2. Segala bentuk kebijakan pendanaan khususnya yang bersumber dari pemerintah pusat harus diarahkan pada pengembangan; (1) SMK masa depan, (2) pola penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi, serta (3) sistem pengujian dan sertifikasi yang mengacu kepada standar Nasional dan Internasional.
3. Sekretariat BNSP harus memulai kegiatannya dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi lembaga yang akan berfungsi sebagai LSP, sehingga pengembangan standar kompetensi dapat segera dimulai.
4. Usaha-usaha tersebut sejauh mungkin menggunakan sumber yang ada baik nasional maupun internasional, selaras dengan prakarsa negara-negara mitra kerja sama.

Perpustakaan
Jenderal

3